

## **EVALUASI KEBIJAKAN KARTU NELAYAN DI KOTA MANADO (Studi Kasus di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Tuminting)**

*Aldi Pioh<sup>1</sup>*  
*Welly Waworundeng<sup>2</sup>*  
*Fanley Pangemanan<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Masyarakat nelayan masih bergantung pada hasil sumber daya alam yang berasal dari laut untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Keberadaan ikan di perairan laut Indonesia sangatlah melimpah, namun masih banyak nelayan tradisional yang terjebak dalam perangkap kemiskinan. Kartu nelayan merupakan wujud penghargaan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap profesi nelayan dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016. Minimnya informasi mengenai kartu nelayan belum mencakup seluruh masyarakat nelayan, kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat enggan untuk membuat kartu nelayan. Adanya kartu ini merupakan wujud penghargaan pemerintah melalui kementerian kelautan dan perikanan terhadap profesi nelayan, penerbitan kartu nelayan ini menjadi instrumen bagi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) dan lembaga pemerintah dalam memberikan pembinaan dan bantuan penguatan usaha kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran. Kartu ini dapat mempermudah nelayan agar dapat menerima program bantuan yang telah dibuat pemerintah. Seperti akses untuk mendapatkan bantuan kapal, alat tangkap, membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dan akses untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian utama bagi pemerintah provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Manado sebagai penyelenggara kartu nelayan. Juga pentingnya mengetahui upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh pihak dinas terkait dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara kartu nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan kartu nelayan terhadap dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Manado sebagai penyelenggara kartu nelayan. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

**Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, Evaluasi Kebijakan**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Potensi sumber daya alam yang terkandung di laut Indonesia sangat kaya dan beraneka ragam. Potensi hasil laut tersebut jika dapat dimanfaatkan secara optimal, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di daerah pesisir pantai yang memiliki akses terdekat dalam pengelolaan hasil laut. Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.

Masyarakat nelayan masih bergantung pada hasil sumber daya alam yang berasal dari laut untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Keberadaan ikan di perairan laut Indonesia sangatlah melimpah, namun masih banyak nelayan tradisional yang terjebak dalam perangkap kemiskinan. Kelompok masyarakat nelayan meraup keuntungan lewat penangkapan dan budidaya ikan. Sebaliknya, bila gagal panen mereka tidak mempunyai sumber pendapatan lain. Jalan pintasnya mereka mengutang pada juragan atau rentenir, imbasnya mereka tidak pernah keluar dari masalah keuangan (financial). Oleh

## Tinjauan Pustaka

Menurut Suharto (2012:80), “evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan serta sejauh mana program dan pelayanan sosial”. Menurut Winarno (2012:228), “bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud dan tujuan

karena itu nelayan termasuk sebagai masyarakat yang rentan. Solusi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi beragam permasalahan masyarakat nelayan yaitu pada bulan april tahun 2016 telah diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kartu Nelayan.

Adanya kartu ini merupakan wujud penghargaan pemerintah melalui kementerian kelautan dan perikanan terhadap profesi nelayan, penerbitan kartu nelayan ini menjadi instrumen bagi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) dan lembaga pemerintah dalam memberikan pembinaan dan bantuan penguatan usaha kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran. Kartu ini dapat mempermudah nelayan agar dapat menerima program bantuan yang telah dibuat pemerintah. Seperti akses untuk mendapatkan bantuan kapal, alat tangkap, membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dan akses untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan.

yang telah ditetapkan sebelumnya”. Menurut Mulyadi (2016:122), secara konseptual ada pandangan yang menyatakan bahwa evaluasi dapat dilakukan pada seluruh periode kegiatan, artinya dapat dilakukan pada saat kegiatan belum dilaksanakan, evaluasi saat kegiatan berjalan, dan setelah kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan pandangan tersebut, evaluasi dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

1. Pra evaluasi, yakni evaluasi yang dilakukan pada saat program belum berjalan atau beroperasi pada tahapan perencanaan.
2. Evaluasi pada saat program tengah berjalan, yang dikenal dengan

ongoing evaluation atau in operation evaluation.

3. Evaluasi setelah program selesai atau setelah program berakhir. Evaluasi ini biasanya disebut ex post evaluation.

Menurut Nugroho (2017:784), “evaluasi terutama menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang diperlukan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan”. Menurut Suharno (2013:184), terdapat beberapa alasan untuk menjawab mengapa perlu ada kegiatan evaluasi kebijakan. Alasan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi internal dan eksternal. Yang bersifat internal, antara lain:

1. Untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan dengan adanya evaluasi kebijakan dapat ditemukan informasi apakah suatu kebijakan sukses atau malah sebaliknya.
2. Untuk mengetahui efektifitas kebijakan, kegiatan evaluasi kebijakan dapat mengemukakan penilaian apakah suatu kebijakan mencapai tujuannya atau tidak.
3. Untuk menjamin terhindarnya pengulangan kesalahan (guarantee to non- recurrence). Sedangkan alasan yang bersifat eksternal paling tidak untuk dua kepentingan, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik
- b. Untuk mensosialisasikan manfaat sebuah kebijakan.

Dari beberapa teori yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap proses dapat dievaluasi, mulai dari tahapan perencanaan kebijakan sampai pada proses selesainya kebijakan tersebut dilaksanakan, evaluasi kebijakan

diperlukan untuk menilai bagaimana suatu proses pelaksanaan kebijakan antara harapan dan realita yang ada, juga sebagai masukan agar dapat menghindari terulangnya kesalahan yang sama.

Menurut Dunn (2013:610), ada beberapa kriteria evaluasi kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas, apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
2. Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4. Perataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?
5. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6. Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Menurut Lester dan Joseph dalam (Mulyadi,2016:110), mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan yaitu:

1. Evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi.
2. Evaluasi dampak atau evaluasi berkenaan dengan hasil dan atau pengaruh dari implementasi kebijakan.
3. Evaluasi kerjakan yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki.
4. Evaluasi (metaevaluasi) yang berkenaan dengan untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

Menurut Anderson dalam (Mulyadi, 2016:111), membagi evaluasi (implementasi) kebijakan publik menjadi tiga tipe yaitu:

1. Pertama, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional.
2. Kedua, evaluasi yang memfokuskan kepada bekerjanya kebijakan.
3. Ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara obyektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauhmana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai.

Menurut Widodo (2018:119), riset evaluasi yang bertujuan untuk menguji apakah suatu kebijakan telah diimplementasikan sesuai dengan rancangan kebijakan/ proyek. Oleh karena itu, riset ini mengkosentrasikan pada dua macam pertanyaan yaitu:

1. Apakah suatu kebijakan atau proyek dapat mencapai wilayah atau kelompok sasaran (target groups)?
2. Apakah usaha-usaha yang diambil dalam intervensi dan praktiknya telah sesuai dengan apa yang dirinci dalam rancangan kebijakan?

Terdapat beberapa alasan mengapa riset evaluasi monitoring kebijakan/proyek ini perlu dilakukan.

- a. Administrasi sumberdaya manusia yang tepat, kebijakan membutuhkan pengalaman nyata yang dikehendaki.
- b. Tidak ada dampak (impact and outcomes) dari kebijakan atau proyek utama dan diterima oleh mereka yang terlibat, karena beberapa alasan berikut:
  1. Banyak kebijakan yang tidak diimplementasikan dan dilakukan dalam cara-cara yang telah dirancang dalam atau sesuai dengan kebijakan.
  2. Kadang-kadang personel dan perlengkapan tidak cukup.
  3. Kadang-kadang staf proyek tidak mempunyai motivasi dan kemampuan teknis untuk melakukan apa yang menjadi tugas mereka.

4. Pihak partisipan (target groups) jumlahnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki proyek, tidak bisa diidentifikasi dengan tepat, dan tidak mau bekerja sama satu sama lain.

Riset evaluasi monitoring kebijakan atau proyek ini hasil akhirnya memberikan assessment yang sistematis, apakah suatu kebijakan dilaksanakan sesuai dengan rancangannya dan apakah suatu kebijakan atau proyek telah mencapai apa yang menjadi sasaran kebijakan (target groups) ?

Dari beberapa kriteria yang ada peneliti lebih cenderung mengarah kepada teori menurut Widodo terkait Riset evaluasi bahwasannya kartu nelayan merupakan program dari kementerian dan daerah hanya menjalankan saja, sehingga kebijakan ini bersifat fungsional karena di daerah tidak ada aturan turunan yang mengatur terkait penyelenggaraan kartu nelayan.

## Metode Penelitian

pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dimana penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono dalam (Gunawan, 2014:83), mengatakan bahwa: “penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci”.

Penelitian kualitatif adalah proses menjangkau informasi dari kondisi yang sebenarnya dalam keadaan suatu objek

yang dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian ini untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dan kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data objektif, dalam rangka mengetahui dan memahami upaya-upaya apa saja yang dilakukan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Manado, sebagai penyelenggara kartu nelayan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah “Evaluasi Kebijakan Kartu Nelayan Di Kota Manado (Studi Kasus di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Tuminting”. Maka aspek yang akan diteliti atau dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana proses evaluasi kebijakan dalam penyelenggaraan kartu nelayan sehingga peneliti mengambil teori evaluasi menurut Widodo (2018:119), dimana menurutnya riset evaluasi mengkonsentrasikan pada dua macam aspek yaitu:

1. Apakah suatu kebijakan atau proyek dapat mencapai wilayah atau kelompok sasaran (target groups) ?

Maksudnya adalah peneliti ingin mengetahui apakah masyarakat nelayan Sindulang I telah mendapat kartu nelayan dan sudah mendapat manfaat dari kartu nelayan.

2. Apakah usaha-usaha yang diambil dalam intervensi dan praktiknya telah sesuai dengan apa yang dirinci dalam rancangan kebijakan?

Maksudnya adalah peneliti ingin mengetahui upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan dinas Pertanian, Kelautan Dan Perikanan (DPKP) Kota Manado dalam menyelenggarakan kartu nelayan, dan apakah sudah sesuai dengan pedoman kartu nelayan.

Narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi

dan kondisi latar penelitian. Informan ini harus banyak memahami tentang kebijakan dan pengelolaan arsip, serta dapat memberikan pandangannya dari proses dan inti pokok yang menjadi sumber masalah. Informan penelitian yang dimaksudkan adalah :

1. Kepala Dinas Pertanian Kelautan, dan Perikanan (1 orang)
2. Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan (1 orang)
3. Penyuluh Kartu Nelayan (1 orang)
4. Camat Tuminting (1 orang)
5. Nelayan terdiri dari dua yaitu:
  - a. Sudah mempunyai kartu nelayan (2 orang)
  - b. Belum mempunyai kartu nelayan (2 orang)

## Hasil Penelitian

pembahasan penelitian ini akan di analisis pada dua aspek tunggal dalam fokus penelitian dengan landasan kajian teori yang di kemukakan oleh, Widodo ada 2 aspek tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada kelompok sasaran (target groups) sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada implementasi oleh penyelenggara. Pelaksanaan program harus senantiasa di evaluasi agar dapat di lihat sejauh mana program tersebut telah berhasil mencapai maksud pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 1. Tujuan Umum Penyelenggaraan Kartu Nelayan

Program atau sebuah kebijakan dari pemerintah yang di berikan untuk masyarakat merupakan produk pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk menuntaskan kemiskinan. Namun dalam proses pelaksanaannya di harapkan berjalan dengan baik maka perlu diberikan

standar-standar agar tepat pada sasaran sehingga dampak dapat di rasakan oleh masyarakat. Jika tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak tercapai maka terjadi suatu permasalahan, dan penting adanya kerja sama dari para aktor utama yaitu pelaksana kebijakan.

Adanya kartu ini merupakan wujud penghargaan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap profesi nelayan, penerbitan kartu nelayan ini menjadi instrumen bagi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan lembaga pemerintah dalam memberikan pembinaan dan bantuan penguatan usaha kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran. Kartu ini dapat mempermudah nelayan agar dapat menerima program bantuan yang telah dibuat pemerintah. Seperti akses untuk mendapatkan bantuan kapal, alat tangkap, membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dan akses untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan. Program Kartu Nelayan ini juga yang menentukan sukses tidaknya kelompok nelayan, karena program ini diterapkan langsung kepada masyarakat melalui kelompok nelayan yang ada. Salah satunya adalah pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan langsung melalui kelompok nelayan yang ada. Berdasarkan hasil dari penelitian peneliti di lapangan dapat di temukan beberapa masalah yang perlu di bahas dalam kajian ini yaitu terkait dengan pelaksanaan program apakah sudah berjalan sesuai dengan sasaran yang di tentukan, untuk itu perlu di adakan sebuah evaluasi program, yang bertujuan untuk mengetahui apakah sudah sesuai yang di harapkan. Berikut ini pembahasan pada tujuan umum penyelenggaraan Kartu Nelayan di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Tuminting Kota Manado: Kesadaran masyarakat nelayan dalam membuat

kartu nelayan, berdasarkan hasil penelitian di masyarakat yaitu di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Tuminting dengan menimbang keterangan semua informan maka, Proses sosialisasi yang dilakukan oleh Penyuluh dengan langsung turun ke masyarakat sudah efektif karena banyak dari masyarakat sudah tahu manfaat dari membuat Kartu Nelayan ini dan masyarakat nelayan pun sudah mulai berdatangan ke Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado untuk mengurus kartu nelayan.

Dari hasil penelitian peneliti mendapatkan beberapa keterangan yang berbeda-beda mulai dari keterangan yang di sampaikan oleh Kepala Bidang di Dinas dan Penyuluh Perikanan yang memberikan keterangan secara teknis dan sedangkan masyarakat lebih memberikan keterangan yang realistik. Berdasarkan keterangan semua informan peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme penyelenggaraan Kartu Nelayan di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Tuminting tidak di ketahui dengan benar oleh masyarakat dan pemerintah Kelurahan dan Kecamatan, sedangkan pihak Penyuluh Perikanan kecamatan Tuminting lebih memahami mekanisme tersebut.

Selain itu juga dalam penelitian ini peneliti juga mendapatkan hasil di lapangan mengenai pelaksana dalam pelaksanaan Kartu Nelayan di kelurahan Sindulang I Kecamatan Tuminting kota manado. Berdasarkan hasil penelitian dan menimbang keterangan dari informan peneliti memberikan pendapat bahwa masyarakat tidak mengetahui bagaimana mekanisme pembuatan atau proses pencetakan kartu tersebut, masyarakat hanya mengetaui lewat himbauan dari kepala lingkungan dan Penyuluh Perikanan saja. Sedangkan sesuai dengan aturan bahwa para

validator adalah pihak Kementerian di pusat mereka juga yang memutuskan apakah data yang diberikan masyarakat sudah valid dan dapat langsung di cetak atau harus memenuhi berkas yang kurang. Artinya selama ini masyarakat hanya mengetahui pelaksana dalam penyaluran Kartu Nelayan adalah kepala lingkungan dan Penyuluh Perikanan. Berdasarkan keterangan semua informan di atas peneliti memberikan kesimpulan bahwa para pelaksana jarang hadir dalam tatap muka dengan masyarakat untuk memberikan sosialisasi terkait dengan Kartu Nelayan tersebut, pelaksana yang peneliti maksud adalah pihak dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado sebagai perpanjangan tangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Berdasarkan semua kajian di atas peneliti menganalisis dengan menggunakan teori dari Widodo yang mengatakan bahwa riset evaluasi mengkosentrasikan pada dua macam aspek, yang pertama apakah suatu kebijakan/ proyek dapat mencapai wilayah atau kelompok sasaran (target groups) Dan berdasarkan keterangan dari hasil penelitian dengan informan di atas peneliti memberikan kesimpulan teori yang di sampaikan oleh Widodo tidak terjadi secara keseluruhan di lapangan dengan dalil bahwa program Kartu Nelayan mulai dari mekanisme dan pelaksana belum sesuai dengan arahan kementerian Kelautan dan Perikanan di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Tuminting Kota Manado sehingga tidak berimplikasi pada pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana mekanisme penerbitan Kartu Nelayan, namun yang berjalan secara keseluruhan hanyalah penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh perikanan bantu pemerintah pusat atau Kementerian Kelautan dan Perikanan

dalam melakukan proses pendataan dan sosialisasi.

## 2. Tujuan Khusus Penyelenggaraan Kartu Nelayan

Tujuan Khusus yaitu untuk mengarahkan sebuah program atau kebijakan dari pemerintah pusat kepada para pelaksana di daerah. Kartu Nelayan merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah dengan tujuan khusus yang diperuntukan pada para penyelenggara di daerah untuk membantu dalam tugas pemberdayaan dan perlindungan masyarakat nelayan serta menuntaskan garis kemiskinan masyarakat nelayan. Pada tahap ini peneliti akan melakukan kajian apakah tujuan khusus dari program bantuan Kartu Nelayan sudah sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat di kelurahan Sindulang I kecamatan Tuminting kota Manado. Berikut ini beberapa aspek kajian tujuan khusus program Kartu Nelayan:

Aspek yang pertama yaitu berkaitan dengan kondisi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado selaku penyelenggara program Kartu Nelayan di kelurahan Sindulang I kecamatan Tuminting kota Manado. Dari hasil penelitian di lapangan peneliti mendapatkan beberapa keterangan yang berbeda-beda dengan informan. Pihak Penyuluh Perikanan kecamatan Tuminting memberikan keterangan yang lebih spesifik terkait mekanisme dan proses penyelenggaraan kartu nelayan, sedangkan kepala bidang dinas mengatakan hal yang lebih realistis dengan situasi yang ada, yaitu dalam penyelenggaraan kartu nelayan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan kota Manado hanya memiliki tujuh orang Penyuluh Perikanan yang melakukan tugas pendataan dan sosialisasi di lapangan terbagi antara

satu orang perwakilan dari pusat dan enam orang merupakan pegawai di Dinas, sedangkan tugas dari bidang Kelautan dan Perikanan melakukan penginputan data di website KKP satu data. Dan kerja sama antara Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan dengan pemerintah Kecamatan setempat hanya sebatas koordinasi, begitu juga dengan pemerintah kelurahan dalam artian proses penyelenggaraan Kartu Nelayan tidak terlibat oleh pemerintah daerah setempat dan hanya dilakukan oleh penyuluh perikanan saja.

Menurut informasi yang diberikan oleh kepala bidang kelautan dan perikanan sosialisasi hanya dilakukan sekali saja, dan proses pencetakan kartu nelayan dulu dilimpahkan kepada dinas kota namun sekarang sudah ditarik kembali ke pemerintah pusat melalui kerjasama dengan pihak bank. Pada aspek ini peneliti memeberikan kesimpulan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh dinas sangat tidak efektif karena hanya dilakukan sekali saja, sedangkan sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh dilapangan tidak sebanding dengan banyaknya masyarakat nelayan yang ada.

Aspek yang kedua proses pencetakan kartu nelayan, pada tahap ini peneliti akan melakukan kajian mengenai proses pencetakan kartu nelayan di kelurahan Sindulang I Kecamatan Tuminting Kota Manado. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan peneliti mendapatkan keterangan dari pihak masyarakat yang mengeluhkan akibat lamanya proses penerbitan atau pencetakan kartu nelayan mereka. Menurut keterangan yang diberikan oleh kepala bidang kelautan dan perikanan dulu dinas dapat melakukan pencetakan kartu namun sekarang kewenangan untuk melakukan pencetakan di tarik ke pusat sehingga

kami sudah tidak dapat melakukan pencetakan kartu, sekarang dalam melakukan pencetakan kartu pemerintah telah melaakukan kerjasama dengan pihak bank sehingga masyarakat nelayan dapat langsung mengambil kartu tersebut di bank. Dari keterangan yang ada peneliti menarik kesimpulan yaitu salah satu penghambat terjadinya keterlambatan penerbitan kartu nelayan yakni proses pencetakan yang semula di berikan kepada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado dalam melakukan pencetakan Kartu nelayan kini di alihkan kepada pihak bank sehingga dapat membingungkan masyarakat nelayan.

Adapun keterangan yang diberikan oleh Penyuluh Perikanan kepada peneliti, yaitu ada beberapa kendala yang mengakibatkan lamanya proses validasi oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, terkadang data yang diberikan oleh masyarakat nelayan terkait data diri mereka tidak lengkap sehingga data mereka menjadi tidak valid, namun terkadang walaupun masyarakat sudah melengkapi data mereka kendala yang berikutnya yaitu lamanya proses validasi dari pemerintah pusat memakan waktu bahkan sampai berbulan-bulan lamanya. Dari keterangan yang ada peneliti memberikan kesimpulan bahwa pentingnya informasi yang diberikan kepada masyarakat nelayan sehingga masyarakat dengan mudah dapat melengkapi berkas sesuai dengan syarat yang diperlukan dan dapat meminimalisir kesalahan pada saat divalidasi oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan semua kajian di atas peneliti menganalisis dengan menggunakan teori dari Widodo yang mengatakan bahwa riset evaluasi mengkosentrasikan pada dua macam aspek, yang pertama apakah suatu

kebijakan/ proyek dapat mencapai wilayah atau kelompok sasaran (target groups) Dan berdasarkan keterangan dari hasil penelitian dengan informan di atas peneliti memberikan kesimpulan teori yang di sampaikan oleh Widodo tidak terjadi secara keseluruhan di lapangan dengan dalil bahwa program Kartu Nelayan mulai dari mekanisme dan pelaksana belum sesuai dengan arahan kementerian Kelautan dan Perikanan di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Tuminting Kota Manado sehingga tidak berimplikasi pada pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana mekanisme penerbitan Kartu Nelayan, namun yang berjalan secara keseluruhan hanyalah penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh perikanan bantu pemerintah pusat atau Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan proses pendataan dan sosialisasi.

Dari hasil kajian penelitian di atas peneliti menyimpulkan bahwa Evaluasi Kebijakan Kartu Nelayan dengan menggunakan bantuan teori dari Widodo tujuan khusus lebih difokuskan pada kelompok sasaran (target groups), bahwa program Kartu Nelayan di kelurahan Sindulang I Kota Manado masih mengalami banyak kendala dalam pelaksanaan di lapangan, seperti mekanisme yang tidak di pahami oleh masyarakat nelayan, para pelaksana yang tidak di ketahui masyarakat nelayan, dan kelengkapan berkas yang kurang dipahami oleh masyarakat.

Berdasarkan keterangan dari hasil penelitian dengan informan di atas peneliti memberikan kesimpulan teori yang di sampaikan oleh Widodo tidak terjadi secara keseluruhan di lapangan dengan dalil bahwa program Kartu Nelayan mulai dari penyelenggaraan yaitu sosialisasi belum sesuai dengan apa yang di diharapkan, teori mengatakan

bahwa evaluasi di fokuskan pada Kelompok Sasaran di lapangan (target groups), sedangkan Kelompok sasaran di lapangan yaitu masyarakat nelayan masih terdapat banyak kendala.

## Kesimpulan

1. Peneliti memberikan kesimpulan teori yang di sampaikan oleh Widodo tidak terjadi secara keseluruhan di lapangan dengan dalil bahwa program Kartu Nelayan mulai dari mekanisme dan pelaksana belum sesuai dengan arahan kementerian Kelautan dan Perikanan di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Tuminting Kota Manado sehingga tidak berimplikasi pada pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana mekanisme penerbitan Kartu Nelayan, yang berjalan secara keseluruhan hanyalah penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh perikanan bantu pemerintah pusat atau Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan proses pendataan dan sosialisasi.
2. Sedangkan untuk tujuan khusus peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan Kartu Nelayan dengan menggunakan bantuan teori dari Widodo tujuan khusus lebih difokuskan pada kelompok sasaran (target groups), bahwa program Kartu Nelayan di kelurahan Sindulang I Kota Manado masih mengalami banyak kendala dalam pelaksanaan di lapangan, seperti mekanisme yang tidak di pahami oleh masyarakat nelayan, para pelaksana yang tidak di ketahui masyarakat nelayan, dan kelengkapan berkas yang kurang dipahami oleh masyarakat. Berdasarkan keterangan dari hasil penelitian dengan informan peneliti memberikan kesimpulan bahwa

program Kartu Nelayan mulai dari penyelenggaraan yaitu sosialisasi tidak sesuai dengan apa yang di harapkan, teori mengatakan bahwa evaluasi di fokuskan pada Kelompok Sasaran di lapangan (target groups), sedangkan Kelompok sasaran di lapangan yaitu masyarakat nelayan masih terdapat banyak kendala.

3. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan dengan sampel yaitu masyarakat nelayan sebagai masyarakat yang menerima kebijakan diperoleh hasil bahwa kinerja kebijakan kartu nelayan di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Tuminting belum berjalan dengan baik, namun sebagian masyarakat nelayan sudah mendapatkan manfaat untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Dari sisi kepuasan masyarakat meskipun dalam hal pelaksanaan sosialisasi yang sudah memuaskan masyarakat nelayan oleh penyuluh perikanan bantu, namun masih terdapat berbagai kendala, terutama dalam hal sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kabupaten kota, maupun dalam hal ketepatan sasaran serta penanganan keluhan.
4. Program kartu nelayan ini pun secara tidak langsung menimbulkan ketergantungan dari masyarakat, masyarakat memiliki keinginan agar program ini dapat terus dilanjutkan, dampaknya masyarakat menjadi tidak produktif dalam mendapatkan penghasilan, sehingga angka kemiskinan pun semakin sulit untuk dapat ditekan. Dari hasil terhadap evaluasi kebijakan kartu nelayan dapat diketahui bahwasannya aparat pemerintah lebih menginginkan agar program ini dapat direvisi dengan membuat bentuk baru kebijakan, hal ini dibuktikan dengan sikap tanggap

yang baik oleh pemerintah, sehingga dengan mengalihkan bentuk kebijakan kekurangan ataupun celah yang ada pada kebijakan bantuan langsung dapat diperbaiki. Prioritas untuk mengalihkan kebijakan ke dalam bentuk lain juga didorong oleh keinginan dari aparat agar terdapat kebijakan yang tidak hanya merupakan bentuk tanggung jawab sosial pemerintah tetapi juga dapat memberdayakan masyarakat.

## Saran

1. Pada aspek tujuan umum, seharusnya Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado turut terlibat aktif sebagai Penyelenggara dengan cara terlibat langsung dalam Sosialisasi pada kelompok nelayan, lebih teliti dalam memberikan informasi kepada calon penerima kartu nelayan serta turut memberi diri dalam tatap muka pada sosialisasi program Kartu Nelayan sehingga masyarakat mengetahui siapa saja yang menjadi penyelenggara kartu nelayan.
2. Pada aspek tujuan khusus, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado perlu memperhatikan kondisi petugas penyuluh perikanan bantu kartu nelayan tersebut, karena merekalah yang menjadi ujung tombak dari penyelenggaraan kartu nelayan ini, seperti memperhatikan jumlah calon penerima kartu nelayan, melakukan rekapitulasi data penerima yang baru untuk di ajukan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga tidak menggunakan data yang lama.
3. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado harus memberikan sosialisasi kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk turut aktif mendukung

- program Kartu Nelayan tersebut dengan cara terlibat sebagai penguat manfaat serta fungsi dari kartu nelayan.
4. Pemerintah dinas kabupaten kota selaku pelaksana kebijakan perlu merevisi berbagai kekurangan yang terdapat dalam program Kartu Nelayan.
  5. Evaluasi yang dilaksanakan kiranya tidak hanya menjadi formalitas belaka, melainkan benar-benar menjadi sebuah rekomendasi dalam pelaksanaan kebijakan selanjutnya dan benar-benar dapat merekam permasalahan sebenarnya yang terjadi di lapangan.
  6. Pelaksanaan program Kartu Nelayan di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Tuminting hanya sebagian kecil bentuk aplikasi program yang bersifat nasional, tentu terdapat beragam kompleksitas permasalahan yang sama ataupun berbeda di tiap-tiap daerah, sehingga perlu adanya evaluasi secara komprehensif dari pemerintah terhadap keberhasilan kebijakan. Kebijakan yang akan dibuat selanjutnya kiranya dapat memuat aspek pelaksanaan, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat jangka pendek, dengan diberdayakan diharapkan mereka dapat lebih mandiri, dan bisa merasakan manfaat jangka panjang dari sebuah kebijakan.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Dunn, W. N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyadi, D. 2015. Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, D. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Gunawan I. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nugroho, R. 2017. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sarwono, J. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suharno. 2013. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Suharto, E. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-6.
- Wahab, S. A. 2016. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widodo, J. 2018. Analisa kebijakan publik (konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Malang: Media Nusa Creative.
- Winarno, B. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS, Cetakan Pertama.
- Karim M. "Nelayan Butuh Kehadiran Negara". Detik News, 18 April 2018  
<https://m.detik.com/news/kolom/d-3977683/.nelayan-butuh-kehadiran-negara>.
- Pusat Data, Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Statistik Kelautan & Perikanan 2015, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015, hlm. 139.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16 Tahun 2016 Tentang Kartu Nelayan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2019 tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan.

Keputusan Menteri Nomor 2 tahun 2016 Tentang Penyuluh Perikanan Bantu.

Wolasan, F."Antusias Nelayan Kota Manado Membuat Kartu Nelayan Minim". *Tribun Manado*, 17 Oktober 2018, Kartu Nelayan. <http://manado.tribunnews.com/2018/10/17/antusias-nelayan-kota-manado-membuat-kartu-nelayan-minim>.

